

PERAN BIROKRAT DESA DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS DIGITAL

ANGGI ANGGRAENI KUSUMONINGTYAS¹, INRINOFITA SARI², MUHAMMAD DWI NURFAISAL³, ARI WITJAKSONO⁴, NURMUNAFIAH LINA⁵

Universitas Pamulang, Indonesia
Email: Inrinofitasari@gmail.com²

Abstract: *This Community Service aims to analyze the role of village bureaucrats in providing digital-based services to improve the quality of public services at the village level. This activity was conducted through a socialization method involving observation and Forum Group Discussion (FGD) with 50 participants. The activity results show that implementing digitalization in Panyirapan Village has positive impacts, such as increased administrative efficiency, service transparency, and community participation. Digitalization also supports more integrated management of village assets, licensing, and social assistance programs. However, significant challenges were identified, including limited digital literacy, technological infrastructure, and resistance to change. Cybersecurity issues are a major concern, given the threat to sensitive data managed by villages.*

Keywords: *Digitalization; Public Service; Village Bureaucrats; Digital Literacy.*

Abstrak: Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk menganalisis peran birokrat desa dalam memberikan pelayanan berbasis digital sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat desa. Kegiatan ini dilakukan melalui metode sosialisasi yang melibatkan observasi dan Forum Group Discussion (FGD) dengan 50 peserta. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa penerapan digitalisasi di Desa Panyirapan memberikan dampak positif, seperti peningkatan efisiensi administrasi, transparansi pelayanan, dan partisipasi masyarakat. Digitalisasi juga mendukung pengelolaan aset desa, perizinan, dan program bantuan sosial secara lebih terintegrasi. Namun, tantangan signifikan ditemukan, termasuk keterbatasan literasi digital, infrastruktur teknologi, dan resistensi terhadap perubahan. Masalah keamanan siber menjadi perhatian utama, mengingat ancaman terhadap data sensitif yang dikelola desa.

Kata Kunci: Digitalisasi; Pelayanan Publik; Birokrat Desa; Literasi Digital.

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah membawa dampak signifikan pada berbagai sektor kehidupan, termasuk sektor pemerintahan (Muttaqin et al., 2021). Di banyak negara, digitalisasi sistem pelayanan publik telah berhasil meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan (Nugraha, 2018). Indonesia, sebagai salah satu negara berkembang dengan populasi yang besar dan beragam, juga turut mengadopsi berbagai inisiatif digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, baik di tingkat pusat maupun daerah, termasuk di tingkat desa. Di era modern ini, pelayanan yang lambat dan birokrasi yang berbelit-belit dianggap sebagai penghalang bagi kemajuan masyarakat (Eko Harry Susanto, 2010). Oleh sebab itu, pemerintah desa dituntut untuk melakukan transformasi digital agar mampu memberikan pelayanan yang lebih baik, cepat, dan responsif kepada masyarakat (Pertiwi et al., 2021).

Digitalisasi dalam pemerintahan desa merujuk pada penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses administrasi serta pelayanan publik di tingkat desa (Rizal et al., 2022). Pelayanan berbasis digital diharapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan klasik dalam pelayanan publik seperti lambannya proses pelayanan, ketidakpastian dalam prosedur, serta kurangnya transparansi. Selain itu, digitalisasi juga diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan publik, terutama di wilayah-wilayah yang terpencil dan sulit dijangkau oleh infrastruktur fisik. Oleh karena itu, peran birokrat desa menjadi sangat penting dalam memastikan proses transformasi digital dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Birokrat desa adalah aparatur pemerintahan yang bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan di tingkat desa, termasuk dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat (Sulismadi et al., 2017). Sebagai aktor utama dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal, birokrat desa memiliki tanggung jawab untuk menerjemahkan kebijakan nasional dan

daerah ke dalam praktik di lapangan (Budiawan & Sunarti, 2021). Di era digital ini, tugas mereka semakin kompleks, karena mereka harus mengintegrasikan teknologi informasi dalam setiap aspek pelayanan publik (Tulungen et al., 2022). Namun, banyak desa di Indonesia yang masih menghadapi berbagai tantangan dalam mengimplementasikan pelayanan berbasis digital, mulai dari keterbatasan infrastruktur teknologi hingga rendahnya literasi digital di kalangan aparat desa dan masyarakat (Firdaus & Ritonga, 2024).

Pemerintah Indonesia, melalui berbagai kebijakan dan program, telah mendorong desa-desa untuk beradaptasi dengan teknologi digital (Sulistiyowati et al., 2021). Salah satu program strategis yang diluncurkan adalah Gerakan Desa Membangun (GDM), yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan melalui pemanfaatan teknologi informasi (Windyaningrum, 2018). Selain itu, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) juga mendorong desa-desa untuk mengembangkan Sistem Informasi Desa (SID), yang memungkinkan desa untuk mengelola data secara digital dan memberikan pelayanan publik yang lebih efisien (Rachman et al., 2023). Meskipun demikian, implementasi program-program ini masih menghadapi berbagai kendala, terutama di desa-desa yang terletak di wilayah terpencil atau yang memiliki sumber daya terbatas (Rachman et al., 2023).

Dalam konteks pelayanan publik, digitalisasi tidak hanya berhubungan dengan penggunaan teknologi semata, tetapi juga terkait dengan perubahan dalam cara birokrat desa bekerja dan berinteraksi dengan masyarakat. Sebagai contoh, penerapan sistem E-Government di tingkat desa memerlukan perubahan dalam struktur organisasi, prosedur kerja, serta sikap dan kompetensi dari para birokrat desa. Para birokrat desa harus mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi, memahami sistem manajemen informasi yang kompleks, serta memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya. Selain itu, mereka juga harus memiliki komitmen yang kuat untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, karena pelayanan yang berbasis teknologi memerlukan kecepatan, akurasi, dan transparansi yang lebih tinggi dibandingkan dengan sistem pelayanan manual.

Namun, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi dalam digitalisasi pelayanan publik di tingkat desa adalah rendahnya literasi digital di kalangan birokrat dan masyarakat. Banyak birokrat desa yang masih kurang familiar dengan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga mereka merasa kesulitan untuk mengadopsi sistem pelayanan berbasis digital. Di sisi lain, banyak masyarakat desa yang juga tidak memiliki akses atau keterampilan yang memadai untuk memanfaatkan layanan digital, baik karena faktor ekonomi, geografis, maupun pendidikan. Hal ini menimbulkan kesenjangan digital (*digital divide*) yang dapat menghambat upaya pemerintah untuk mewujudkan pelayanan publik yang inklusif dan merata.

Selain masalah literasi digital, keterbatasan infrastruktur teknologi juga menjadi salah satu kendala utama dalam penerapan pelayanan berbasis digital di desa-desa. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memperluas akses internet di seluruh pelosok negeri, masih banyak desa yang belum memiliki akses internet yang memadai. Bahkan di beberapa wilayah yang telah memiliki akses internet, kecepatan dan kualitas jaringan masih jauh dari standar yang diperlukan untuk mendukung pelayanan publik berbasis digital. Kondisi ini memerlukan perhatian lebih, mengingat infrastruktur teknologi merupakan prasyarat dasar bagi pelaksanaan pelayanan berbasis digital.

Tantangan lainnya adalah resistensi terhadap perubahan, baik dari pihak birokrat desa maupun masyarakat. Proses digitalisasi seringkali dianggap sebagai sesuatu yang rumit dan mahal, sehingga menimbulkan sikap resistensi atau ketidakpedulian dari birokrat desa. Banyak aparat desa yang lebih nyaman dengan sistem pelayanan manual yang sudah mereka kuasai, sehingga enggan untuk belajar dan beradaptasi dengan teknologi baru. Selain itu, sebagian masyarakat desa juga masih skeptis terhadap pelayanan berbasis digital, karena mereka lebih terbiasa dengan interaksi langsung dan pelayanan tatap muka. Untuk itu, diperlukan upaya sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif agar proses digitalisasi dapat diterima dengan baik oleh semua pihak. Oleh karena itu tujuan dibuatnya penelitian ini, adalah untuk mengetahui sejauh mana peran birokrat Desa Penyirapan, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang dalam memberikan pelayanan masyarakat berbasis digital.

B. Metode Pelaksanaan Kegiatan

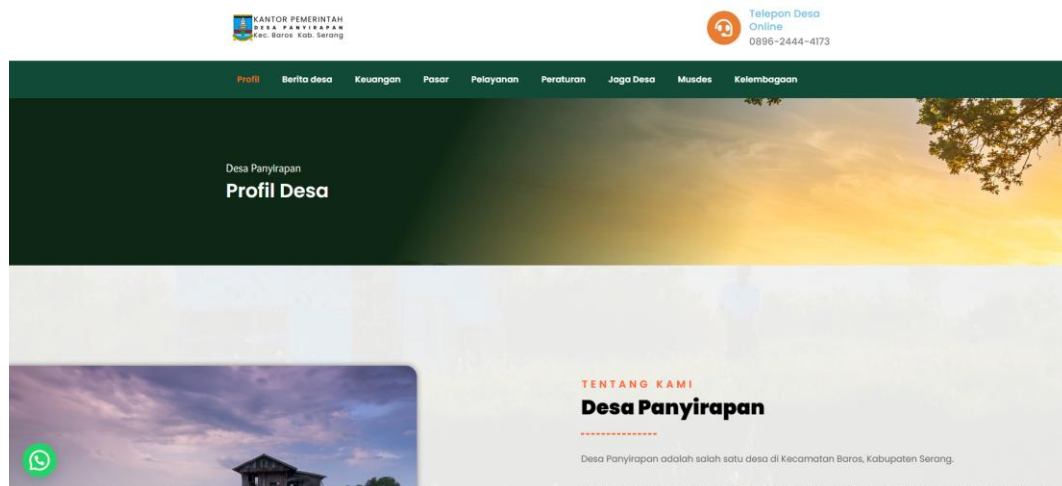
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan melalui metode sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan literasi digital dan pemahaman teknis aparatur desa dalam implementasi digitalisasi administrasi dan pelayanan publik di Desa Panyirapan, Kecamatan Baros. Proses pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan Forum Group Discussion (FGD), di mana peserta diberikan stimulasi pemahaman terkait Peran Birokrat Desa dalam Memberikan Pelayanan kepada Masyarakat Berbasis Digital di Desa Panyirapan, Kecamatan Baros. Data penelitian diperoleh dari 50 peserta yang terlibat dalam FGD. Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pemilihan model analisis interaktif ini bertujuan untuk memastikan temuan penelitian lebih terarah dan spesifik dalam menyajikan hasil terkait Peran Birokrat Desa dalam Memberikan Pelayanan kepada Masyarakat Berbasis Digital.

C. Hasil dan Pembahasan

Digitalisasi desa merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah Indonesia untuk mendukung pembangunan berbasis teknologi. Seiring dengan perkembangan global, desa tidak hanya menjadi pusat aktivitas agraris tetapi juga ekosistem digital yang potensial, termasuk di Desa Panyirapan, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang. Program Desa Digital yang dicanangkan pemerintah bertujuan untuk mengintegrasikan teknologi informasi dalam berbagai aspek pelayanan publik, mulai dari administrasi hingga pengelolaan keuangan desa. Penerapan digitalisasi di desa memiliki akar historis yang terkait dengan revolusi industri 4.0, di mana teknologi informasi dan komunikasi menjadi motor penggerak utama.

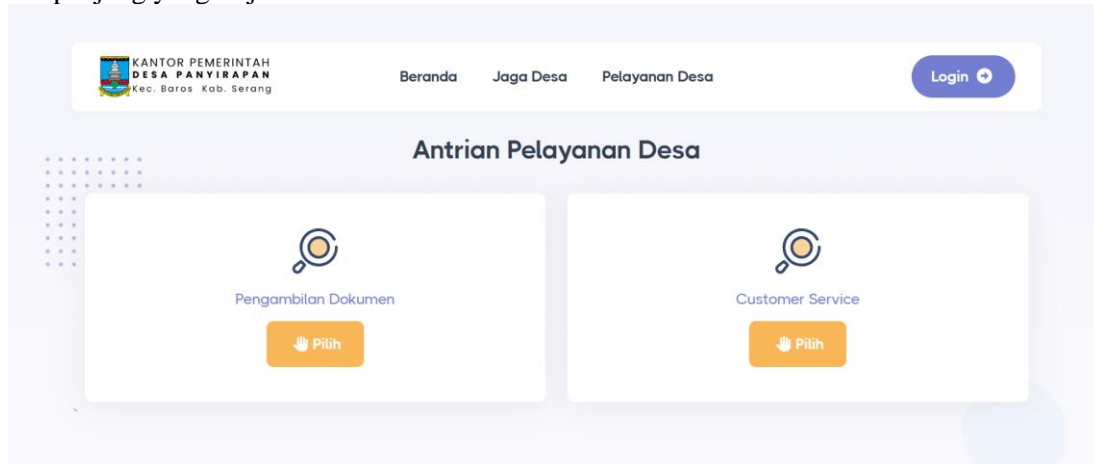
Namun tantangan geografis, sosial, dan ekonomi sering kali menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan ini. Upaya untuk meningkatkan konektivitas digital di desa-desa membutuhkan peran aktif pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, kebijakan nasional seperti pembangunan infrastruktur jaringan internet melalui Palapa Ring menjadi landasan penting dalam memperluas akses digital di wilayah pedesaan. Partisipasi aktif masyarakat desa dalam mendukung transformasi digital juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan kebijakan ini.

Birokrat desa memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan dalam penerapan digitalisasi. Peran mereka mencakup berbagai aspek, mulai dari fasilitasi hingga implementasi kebijakan digital di tingkat desa. Sebagai fasilitator, birokrat desa bertanggung jawab untuk memastikan bahwa teknologi yang diadopsi sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, khususnya Desa Panyirapan, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang. Dalam menjalankan tugasnya, birokrat desa perlu memiliki kompetensi digital yang memadai. Hal ini mencakup kemampuan untuk menggunakan teknologi dalam urusan administratif, mengelola basis data, dan memahami prinsip-prinsip keamanan siber. Pelatihan dan pengembangan kompetensi secara berkala diperlukan agar birokrat desa dapat mengikuti perkembangan teknologi terkini.



Gambar 1. Tampilan *Website* Desa Panyirapan
Sumber: *Website* Resmi Desa Panyirapan, 2024.

Gambar 1 diatas menjelaskan bahwa penggunaan teknologi dalam urusan administratif memungkinkan proses administrasi yang lebih cepat. Sebagai contoh, pengurusan dokumen kependudukan seperti KTP, KK, dan akta kelahiran dapat dilakukan secara daring. Warga tidak perlu lagi menghabiskan waktu untuk mengantre lama di kantor desa, sehingga efisiensi pelayanan meningkat. Pemerintah Desa Panyirapan, dalam memberikan layanan pengurusan dokumen kependudukan dapat melakukan *reservasi* menggunakan *website*. Pelayanan tersebut dapat mengetahui estimasi waktu tunggu masyarakat yang membutuhkan layanan, sehingga mengurangi antrean panjang yang terjadi di kantor desa.

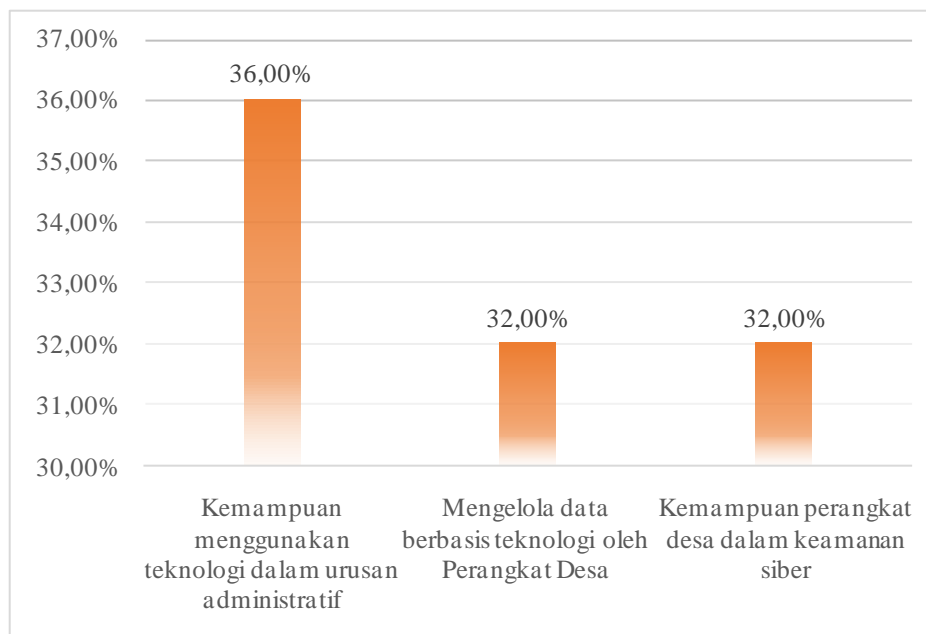


Gambar 2. Pelayanan Desa berbasis *Website*
Sumber: *Website* Desa Panyirapan, 2024.

Gambar 2 menjelaskan bahwa Penggunaan teknologi dalam urusan administratif juga berkontribusi pada pengumpulan data yang lebih akurat. Dengan data yang tersimpan secara digital, Perangkat Desa Panyirapan dapat melakukan analisis untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat sasaran. Misalnya, perangkat desa dapat memantau tren kebutuhan masyarakat dan merancang program yang relevan berdasarkan data tersebut. Pemerintah Desa Panyirapan telah mengaplikasikan model analisis berdasarkan data yang berasal dari:

1. Keluhan masyarakat yang disampaikan melalui *whatsapp* 24 jam
2. Keluhan masyarakat yang datang secara langsung ke Kantor Desa
3. Keluhan masyarakat yang menyampaikan langsung kepada Kepala Desa
4. Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (MUSRENBANGDes)

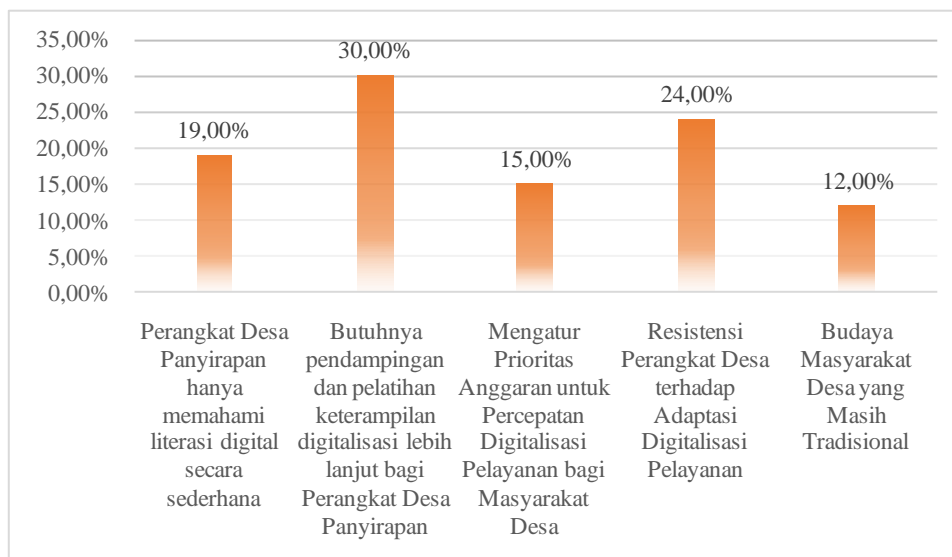
Pemerintah Desa Panyirapan telah menyiapkan infrastruktur digital secara memadai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kantor Kepala Desa panyirapan telah memiliki kualitas internet yang baik dan bisa digunakan bagi seluruh perangkat desa. Tujuannya agar seluruh perangkat desa dapat memberikan pelayanan administratif bagi masyarakat secara maksimal, bahkan menyediakan layanan internet gratis yang terbuka bagi masyakat umum. Hal tersebut menjadikan Desa Panyirapan dirasa sudah siap dalam beradaptasi dan meningkatkan layanan kepada masyarakat berbasis digital.



Gambar 3. Peran Birokrat Desa dalam Memberikan Pelayanan Digital bagi Masyarakat

Berdasarkan gambar 3 diatas menjelaskan bahwa Kemampuan perangkat desa dalam menggunakan teknologi untuk urusan administrasi dengan persentase 36,00% menunjukkan bahwa meskipun teknologi telah mulai diadopsi, penerapannya masih belum merata atau optimal. Angka ini mengindikasikan bahwa sebagian perangkat desa telah memahami pentingnya teknologi untuk meningkatkan efisiensi dalam penyelesaian tugas administrasi, seperti pengelolaan dokumen, pencatatan data kependudukan, atau pengelolaan anggaran desa. Namun, terdapat tantangan dalam memastikan bahwa seluruh perangkat desa memiliki keterampilan yang sama dalam memanfaatkan teknologi secara efektif. Salah satu penyebab utama mungkin adalah keterbatasan pelatihan yang komprehensif atau akses terhadap perangkat teknologi yang memadai, sehingga potensi pemanfaatan teknologi belum dapat dioptimalkan untuk memperbaiki layanan administrasi desa secara keseluruhan.

Selanjutnya Pengelolaan data berbasis teknologi oleh perangkat desa dengan persentase 32,00% mencerminkan bahwa upaya digitalisasi data di tingkat desa masih dalam tahap awal. Pengelolaan data berbasis teknologi ini penting untuk menciptakan sistem informasi yang efisien dan mendukung proses pengambilan keputusan berbasis data. Namun, angka ini juga menunjukkan bahwa masih ada kendala, seperti kurangnya infrastruktur teknologi, keterbatasan dana, atau minimnya keahlian perangkat desa dalam menggunakan perangkat lunak pengelolaan data. Jika tidak segera diatasi, hal ini dapat menghambat transformasi digital di desa, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, dukungan pemerintah atau pihak terkait untuk menyediakan pelatihan, perangkat teknologi, dan panduan teknis sangat diperlukan agar pengelolaan data berbasis teknologi dapat berjalan dengan baik. Kemudian Kemampuan perangkat desa dalam keamanan siber, yang juga berada pada angka 32,00%, menjadi perhatian khusus dalam era digital yang penuh dengan ancaman siber. Rendahnya kesadaran dan keterampilan perangkat desa dalam melindungi data dan informasi digital dapat membuka peluang bagi pelanggaran keamanan yang dapat merugikan desa, baik dari segi materiil maupun reputasi. Hal ini mengindikasikan perlunya edukasi intensif tentang pentingnya keamanan siber, termasuk penggunaan kata sandi yang kuat, enkripsi data, dan cara mengenali serta menghadapi ancaman siber seperti phishing atau malware. Selain itu, pengadaan infrastruktur keamanan siber yang memadai, seperti firewall dan perangkat lunak antivirus, juga harus menjadi prioritas. Oleh karena itu, kemampuan perangkat desa dalam keamanan siber dapat ditingkatkan untuk melindungi data dan informasi yang menjadi aset penting dalam tata kelola pemerintahan desa.



Gambar 4. Kendala dalam Transformasi Digital di Desa Panyirapan

Berdasarkan gambar 4 menjelaskan bahwa Tingkat literasi digital perangkat Desa Panyirapan menunjukkan bahwa mayoritas hanya memahami teknologi secara sederhana, dengan presentase sebesar 19%. Pemahaman ini umumnya terbatas pada kemampuan dasar, seperti mengoperasikan perangkat atau menggunakan aplikasi umum tanpa kemampuan untuk memanfaatkan teknologi secara strategis dalam mendukung pelayanan publik atau tata kelola desa. Hal ini menjadi tantangan besar mengingat perkembangan teknologi saat ini menuntut perangkat desa untuk lebih adaptif dan kompeten dalam menggunakan berbagai perangkat digital yang kompleks untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat. Pemahaman yang terbatas ini mengindikasikan adanya kesenjangan keterampilan yang harus segera diatasi melalui program peningkatan literasi digital yang berkelanjutan.

Selanjutnya Kebutuhan akan pelatihan dan pendampingan keterampilan digital menjadi prioritas utama, dengan presentase 30%. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menggunakan perangkat lunak yang relevan, manajemen data digital, serta memahami konsep-konsep teknologi seperti e-government dan sistem informasi desa. Selain itu, pendampingan ini juga membantu menghilangkan rasa cemas atau kesulitan perangkat desa dalam beradaptasi dengan perubahan digital. Dengan keterampilan yang lebih baik, perangkat desa dapat memanfaatkan teknologi untuk mempercepat pengambilan keputusan, meningkatkan pelayanan masyarakat, dan memperbaiki sistem administrasi.

Selanjutnya Perlunya Prioritas Anggaran untuk Digitalisasi dengan presentase 15% menunjukkan kebutuhan yang mendesak untuk mendukung transformasi digital melalui alokasi anggaran yang memadai. Anggaran tersebut dapat digunakan untuk membeli perangkat keras seperti komputer, perangkat jaringan, dan sistem keamanan data, serta untuk mendukung pelatihan dan pengembangan kapasitas perangkat desa. Pengelolaan anggaran yang baik juga akan memastikan bahwa implementasi digitalisasi berjalan lancar dan berkelanjutan, sehingga masyarakat dapat menikmati manfaat dari layanan yang lebih cepat dan efisien.

Kemudian Resistensi Perangkat Desa terhadap Adaptasi Digital dengan presentase 24% menunjukkan bahwa hampir seperempat perangkat desa merasa enggan atau kurang nyaman dalam mengadopsi teknologi digital. Penyebab resistensi ini bisa beragam, mulai dari ketakutan terhadap hal baru, kebiasaan dengan metode tradisional, hingga kurangnya pemahaman tentang manfaat digitalisasi. Untuk mengatasi resistensi ini, diperlukan pendekatan yang strategis, seperti memberikan pemahaman tentang keuntungan jangka panjang digitalisasi, menyediakan pelatihan bertahap, serta menciptakan lingkungan kerja yang mendukung adaptasi teknologi. Dan yang terakhir Budaya Masyarakat Desa yang Masih Tradisional dengan presentase 12% menunjukkan bahwa Budaya ini mencakup preferensi terhadap interaksi tatap muka dan metode pelayanan manual yang sudah mengakar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Tradisi ini sering kali membuat masyarakat

kurang tertarik untuk beralih ke sistem digital, meskipun lebih efisien. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan edukasi yang mengedepankan komunikasi berbasis budaya lokal untuk memperkenalkan manfaat digitalisasi secara perlahan dan menyeluruh. Sosialisasi yang efektif dapat membantu masyarakat menerima teknologi sebagai alat yang mendukung keseharian mereka tanpa menghilangkan nilai-nilai tradisional.



Gambar 5. Pengabdian Kepada Masyarakat di Desa Panyirapan Kecamatan Baros, Kabupaten Serang
Sumber. Forum Group Discussion, (2024)

Gambar 5 menunjukkan bahwa program pengabdian kepada masyarakat ini sangat efektif dalam mendukung modernisasi pelayanan publik di Desa Panyirapan, Kecamatan Baros. Penelitian ini tidak hanya relevan sebagai bagian dari tanggung jawab akademik melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi, tetapi juga berkontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas pelayanan berbasis digital. Temuan dari forum group discussion (FGD) mengungkapkan beberapa tantangan yang dihadapi perangkat desa, seperti keterbatasan literasi digital, kurangnya pelatihan teknis, dan keterbatasan infrastruktur teknologi. Selain itu, resistensi terhadap perubahan serta budaya masyarakat yang masih tradisional menjadi kendala utama dalam proses adaptasi digitalisasi pelayanan. Meskipun demikian, penerapan teknologi digital telah membawa dampak positif terhadap efisiensi administrasi, transparansi pelayanan, dan pengelolaan data yang lebih akurat. Dengan dukungan pelatihan berkelanjutan dan peningkatan infrastruktur teknologi, perangkat desa dapat lebih optimal dalam memberikan pelayanan publik berbasis digital. Digitalisasi juga membuka peluang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta mempercepat berbagai proses administrasi dan program bantuan sosial. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah desa untuk menjadikan pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan infrastruktur sebagai prioritas utama guna memaksimalkan manfaat digitalisasi pelayanan publik.

D. Penutup

Penerapan digitalisasi dalam pelayanan publik di Desa Panyirapan, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, merupakan langkah strategis yang relevan dengan kebutuhan zaman. Digitalisasi telah memberikan dampak positif terhadap efisiensi administrasi, transparansi pelayanan, serta peningkatan partisipasi masyarakat. Dengan pengelolaan data yang lebih akurat, pemerintah desa dapat membuat keputusan yang lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Sistem digital juga telah mendukung pengelolaan aset desa, perizinan, dan program bantuan sosial dengan cara yang lebih terintegrasi dan efektif. Namun, meskipun terdapat berbagai manfaat yang dirasakan, proses digitalisasi tidak terlepas dari tantangan signifikan. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, dan resistensi terhadap perubahan. Sebagian perangkat desa masih memiliki keterbatasan literasi digital, sementara keterbatasan akses internet dan perangkat teknologi menjadi kendala utama di wilayah pedesaan. Selain itu, resistensi terhadap perubahan mencerminkan perlunya pendekatan edukatif dan persuasif untuk mengatasi hambatan budaya kerja tradisional. Pentingnya keamanan siber juga menjadi perhatian utama dalam proses digitalisasi. Dengan meningkatnya jumlah data sensitif yang dikelola, ancaman terhadap keamanan informasi menjadi hal yang tidak dapat

diabaikan. Perangkat desa sering kali belum memiliki kapasitas yang memadai dalam mendeteksi, mencegah, dan menangani ancaman siber, sehingga pelatihan teknis dan peningkatan infrastruktur keamanan menjadi kebutuhan mendesak.

Daftar Pustaka

- Budiawan, A., & Sunarti, N. (2021). ANALISIS ETIKA PEJABAT BIROKRASI INDONESIA: Array. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu ...*, 7(November), 725–745. <https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat/article/view/2545%0Ahttps://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat/article/download/2545/1939>
- Eko Harry Susanto. (2010). Kelambanan Reformasi Birokrasi dan Pola Komunikasi Lembaga Pemerintah. *Jurnal ASPIKOM*, 1(1), 109–124.
- Firdaus, K., & Ritonga, M. (2024). Peran Teknologi Dalam Mengatasi Krisis Pendidikan di Daerah Terpencil. *Jurnal Kepemimpinan Dan Pengurusan Sekolah*, 9(1), 43–57. <https://doi.org/10.34125/jkps.v9i1.303>
- Muttaqin, A. R., Wibawa, A., & Nabila, K. (2021). Inovasi Digital untuk Masyarakat yang Lebih Cerdas 5.0: Analisis Tren Teknologi Informasi dan Prospek Masa Depan. *Jurnal Inovasi Teknologi Dan Edukasi Teknik*, 1(12), 880–886. <https://doi.org/10.17977/um068v1i122021p880-886>
- Nugraha, J. T. (2018). E-Government dan pelayanan publik (studi tentang elemen sukses pengembangan e-government di pemerintah kabupaten Sleman). *Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media*, 32–42. <https://www.academia.edu/download/64644054/228481721.pdf>
- Pertiwi, A., Dema, H., Mustanir, A., & Anugrah, E. (2021). PENERAPAN E-GOVERNMENT DALAM MEWUJUDKAN TRANSPARANSI TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA (Studi pada Pemerintahan Desa Bulu Timoreng). *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 9(3), 130–139. <https://doi.org/10.55678/prj.v9i3.508>
- Rachman, F., Batubara, A., Kabatiah, M., & Irwansyah. (2023). Pendampingan Mewujudkan SDGs Desa Point Partnership For The Goals Melalui Sistem Informasi Desa Berbasis Web Sebagai Respresentasi Desa Wisata Berkelanjutan. *Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat 14 September 2022*, 418–425.
- Rizal, A., Triandani, S., April, M., & Alkadafi, M. (2022). Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Dalam Penataan Administrasi Pemerintahan Desa Berbasis Teknologi Informasi (E-Government). *Jurnal EL-RIYASAH*, 13(1), 76. <https://doi.org/10.24014/jel.v13i1.18174>
- Sulismadi, S., Wahyudi, W., & Muslimin, M. (2017). Model Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa dalam Menjalankan Fungsi Pemerintahan Berbasis Electronic Government (E-Government) menuju Pembangunan Desa Berdaya Saing. *Aristo*, 5(2), 216. <https://doi.org/10.24269/aristo.v2.2016.2>
- Sulistyowati, F., Tyas, H. S., Dibyorini, M. C. C. R., & Puspitosari, C. (2021). Pemanfaatan Sistem Informasi Desa (SID) untuk Mewujudkan Smart Village di Kalurahan Panggunharjo DIY (Utilization of Sistem Informasi Desa (SID) to Realize Smart Village in Kalurahan Panggunharjo, Sewon, Bantul, DI Yogyakarta). *JURNAL IPTEKKOM Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informasi*, 23(2), 213–226. <https://doi.org/10.17933/iptekkom.23.2.2021.213-226>
- Tulungen, E. E. W., Saerang, D. P. E., & Maramis, J. B. (2022). Transformasi Digital : Peran Kepemimpinan Digital. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 10(2), 1116–1123. <https://doi.org/10.35794/emba.v10i2.41399>
- Windyaningrum, R. (2018). Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Melalui Pengembangan Sistem Informasi Desa Pada Website Pemerintah Desa. *Indonesia Yang Berkeadilan Sosial Tanpa Diskriminasi*, pp 1-22.